

Term of Reference
Talk Show
“PERAN PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA”
dan Pelantikan Pengurus Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia
Rabu, 21 Desember 2016

A. PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Dalam pada itu, pengaruh dari suatu kebijakan memiliki dampak luas pada beragam elemen di masyarakat. Salah satu elemen yang menduduki proporsi cukup besar di negeri ini adalah kaum perempuan. Kaum perempuan memiliki peran vital dalam berbagai bidang. Lebih dari pada obyek dari suatu kebijakan, secara ideal dia juga diharapkan menjadi subyek yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.

Untuk mencapai ideal tersebut tentulah dibutuhkan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dari kaum perempuan sendiri. Di negeri ini, kaum perempuan telah memiliki pengalaman sejarah yang cukup panjang dalam memberdayakan dan mengorganisasi kaumnya, bahkan sejak masa pra-kemerdekaan. Hari Ibu yang dikukuhkan pada tanggal 22 Desember 1928 oleh Presiden RI pertama Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 316 tahun 1959 menyimpan makna yang dalam. Peringatan tersebut menjadi pengingat dari momen historis Kongres Perempuan Indonesia yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928. Sebelumnya, pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, kaum perempuan juga turut terlibat aktif dalam partisipasi. Gerak kesejarahan untuk memberdayakan perempuan berlangsung terus hingga kini. Secara kelembagaan pun pemerintah telah lebih mengakui peran perempuan, terbukti dengan misalnya pembentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Komnas Perempuan.

Dalam kehidupan sosial dan profesional, perempuan juga telah berperan secara aktif, meskipun tingkat penghargaan kepada perempuan harus diakui membutuhkan perjuangan dan mengalami masa pasang-surut. Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang telah cukup banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis. Sejak tahun 1946 hingga 2016 telah terdapat 33 perempuan yang menduduki jabatan politik strategis seperti presiden dan menteri. Hingga kini kiprah perempuan Indonesia terus mengisi di berbagai peran dan posisi strategis

di berbagai sector: politik, pendidikan, bisnis, social, budaya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia merupakan sumber daya potensial jika ditingkatkan kualitasnya dan diberikan kesempatan yang sama dalam berperan.

Meski demikian, bukan berarti bahwa kondisi perempuan telah berada dalam kondisi yang ideal. Masih banyak hambatan dan diskriminasi yang dialami perempuan. Misalnya, hingga saat ini persentase jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis sebagai pengambil keputusan, baik di eksekutif maupun legislative, masih relatif kecil jika dibandingkan dengan laki-laki. Sementara itu, penelitian *Partnership For Governance Reform* tahun 2003 menunjukkan bahwa perempuan bisa mencapai karier politik birokrasi melalui kompetisi demokratis semacam pilkada langsung, tetapi tidak mungkin atau sangat jarang mampu meraih puncak karier sebagai pemimpin administrasi dan kebijakan pemerintahan di daerah (Sekda). Berangkat dari permasalahan tersebut, maka diperlukannya kesetaraan kader laki-laki dan perempuan yang baik agar sesuai dengan esensi kebijakan afirmatif yaitu mengeliminasi prasangka, pengucilan, dan pengabaian yang melahirkan diskriminasi melalui perlakuan yang adil dan fair. Kebijakan afirmatif dan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) menjadi dua konsep yang banyak didengungkan untuk memperbaiki kondisi ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, bertepatan dengan hari Ibu, Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan *Knowledge Sector Initiative* (KSI) dan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) akan menyelenggarakan seminar nasional dalam bentuk *Talk Show* dengan tema “Peran Perempuan dalam Kebijakan Publik di Indonesia”. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) merupakan jabatan fungsional baru yang diharapkan dapat berperan secara aktif dalam meningkatkan kualitas kebijakan di Indonesia, tidak terkecuali kebijakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di Indonesia, LAN bekerjasama dengan *Knowledge Sector Initiative* (KSI) telah memfasilitasi terbentuknya organisasi profesi Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) yang diharapkan dapat meningkatkan peran strategis analis kebijakan. Sebagai tindak lanjut keberadaan Organisasi Profesi tersebut maka pada kesempatan ini pula dilaksanakan pengukuhan pengurus AAKI. AAKI percaya bahwa untuk meningkatkan harkat dan kualitas hidup perempuan yang lebih baik, maka perempuan perlu semakin memegang peran kunci dalam pembuatan kebijakan. Dengan perempuan menjadi

subyek, maka dia dapat mengambil alih perspektif kaumnya sehingga kebijakan yang dihasilkan akan lebih berkeadilan dan pro-perempuan. Pada akhirnya, dengan perempuan yang lebih berdaya dan sejahtera, seluruh bangsalah yang akan menikmati hasilnya.

B. TUJUAN

Talk show bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran atau *awareness* tentang perempuan di dunia birokrasi dan politik;
2. Meningkatkan peran Analisis Kebijakan dalam berbagai kebijakan termasuk kebijakan terkait hak-hak perempuan dalam pembangunan Indonesia;
3. Peningkatan kualitas kebijakan melalui profesionalisme profesi Analisis Kebijakan;
4. Peningkatan kompetensi politis (komunikasi dalam kebijakan publik);
5. Menjaring anggota organisasi profesi Analisis Kebijakan.

C. AGENDA ACARA

Acara akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Rabu, 21 Desember 2016

Waktu : 08.30 – 12.00 WIB

Tempat : Aula Gedung A, Lembaga Administrasi Negara
Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat

Agenda Acara *Talk Show*
“PERAN PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA”
Dan Pelantikan Pengurus Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia
Rabu, 21 Desember 2016

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.00 - 08.30	Pendaftaran	Panitia
08.30 - 08.40 08.40 - 08.45 08.45 - 09.45	Sambutan Arahan dan Pembukaan Keynote speech Peran Perempuan dalam Gelombang Perekonomian Global	- DFAT - Kepala LAN - Dr. Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan RI
09.45 - 12.00	Talkshow Panel : 1. Prof. Dewi Fortuna Anwar, MA.Ph.D – Deputi Sekretaris Wakil Presiden RI, <i>‘Strategi Mem-Blowup Isu Publik Menjadi Isu Strategis’</i> 2. Sri Hadiati WK, SH., MBA - Sekretaris Utama LAN, <i>‘Perempuan Birokrasi dalam Perspektif Administrasi Negara’</i> 3. Dr. Sri Budi Eko Wardani – Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, <i>‘Studi Kasus Peran Perempuan dalam Birokrasi dan Politik di Indonesia’</i> 4. dr. Cellica Nurrachdiana, Bupati Karawang, <i>‘Peran Perempuan dalam Percepatan Pembangunan Daerah’</i> Tanya Jawab	Moderator : Rosiana Silalahi, Kompas TV

12.15 – 12.30	Pelantikan Pengurus Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia (AAKI)	1.Kepala LAN, 2.Deputi Bidang Kajian Kebijakan, 3.Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan
12.30	Penutupan	

D. PESERTA

Peserta *talk show* terdiri atas seluruh kementerian, lembaga, daerah (K/L/D) di seluruh Indonesia serta mitra pembangunan lainnya seperti KSI, AIPEG, Australia Award, IABIE, DFAT, MAMPU, dan GIZ